

## **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI DAN DANA BANTUAN PEMERINTAH TERHADAP PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**

**Sri Ramadhani, SE., M.Si., CA<sup>1</sup>**  
**Cahyo Utomo, SE., M.Si., Ak.<sup>2</sup>**

Universitas Unisbank Semarang

*sriramadhani@gmail.co.id<sup>1</sup>*  
*www.unisbank.ac.id<sup>2</sup>*

Diterima: November 2018. Disetujui: Desember 2018. Dipublikasikan: Januari 2019

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to identify and analyze whether Regional Original Income, Allocation Funds and government assistance can increase the human development index. The analytical method used is multiple regression by carrying out the classical assumption test method before collecting the best research model. The research sample was 15 districts / cities in Central Java Province. Human Development Index data was obtained from the Indonesian Central Statistics Agency. The results of this study concluded that Regional Original Revenue and Allocation Funds simultaneously influence the Human Development Index. The results are consistent with the research hypothesis. The results of partial hypothesis testing can be seen that there is a significant effect of variable local revenue and allocation funds to increase the index of human growth.*

*Keywords: Regional Original Revenue, Alokasi Fund, Central Java Province*

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi dan bantuan pemerintah dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan melakukan metode uji asumsi klasik sebelum mengumpulkan model penelitian terbaik. Sampel penelitian adalah 15 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah. Data Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari Lembaga Pusat Statistik Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah serta Dana Alokasi berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasilnya konsisten dengan hipotesis penelitian. Hasil uji hipotesis secara parsial dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi terhadap peningkatan indeks pertumbuhan manusia.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi, Provinsi Jawa Tengah

## **PENDAHULUAN**

Reformasi pemerintahan yang disertai dengan keterbukaan sudah menjadi tuntutan di Indonesia. Hal ini menyebabkan semakin menguatnya tuntutan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Hal itulah yang mendorong terjadinya proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut dengan otonomi. Otonomi adalah pendelegasian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan membawa suatu konsekuensi logis, bahwa tiap daerah harus berkemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Samad & Iyan, 2013).

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang semuanya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pesatnya pembangunan daerah membutuhkan alokasi dana pembangunan yang besar sehingga menyebabkan belanja pemerintah daerah juga semakin meningkat. Besarnya belanja daerah ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah yang bersangkutan. Instansi pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja tentunya harus mampu menunjang pertumbuhan belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari setiap kota/kabupaten yang ada di Indonesia (Kainde, 2013). Pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam perekonomian (Christopher, 2009). Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan (Saragih, 2013). Dalam membiayai belanja daerah diperlukan pendapatan daerah yang memadai. Pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Mangowal, 2013). Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Halim & Kusufi, 2012).

Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah tersebut. Menurut Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa “dari segi pendapatan, kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan daerahnya masih belum signifikan. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal”.

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Mamuka & Elim, 2014). Pada umumnya, dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, perbaikan sistem perpajakan, dan koreksi ketidakefisienan fiskal (Santoso & Suparta, 2015). Perkembangan dana perimbangan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Masalah yang sering terjadi pada dana perimbangan yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah secara signifikan karena habis untuk belanja pegawai. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sa'diyah & Putri (2015) yang meneliti pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Penelitian lain yang dilakukan Panji & Indrajaya (2016) yang meneliti pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Hasilnya menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Pembangunan suatu negara diharapkan mampu memberikan hasil nyata yaitu *Pro Growth, Pro Poor, Pro Job* dan *Pro Environment* yang artinya menciptakan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan untuk kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, dan yang paling populer saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks (HDI)*, yang diluncurkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari *London School of Economics* dalam bukunya yang berjudul *Reflections on Human Development* (1995), dan telah disepakati dunia melalui *United Nation Development Program* (UNDP). IPM Indonesia tahun 2012 berada pada nilai 62,9 di urutan 121, tahun 2011 di urutan 124 dan tahun 2010 di urutan

108 dari 187 negara yang disurvei. IPM Indonesia dibandingkan dengan Negara di kawasan ASEAN masih sangat rendah, yang berada pada peringkat ke-6 dan hanya unggul dari Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Pembangunan di wilayah Sumatera Utara, juga masih menghadapi berbagai permasalahan terutama di bidang kesehatan dan infrastruktur. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu instrumen fiskal dana perimbangan selain Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), bertujuan untuk mendukung pembangunan. Sumber pembiayaan lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan keuangan provinsi. Hal tersebut harus diikuti juga dengan alokasi belanja yang tepat.

Penelitian yang peneliti lakukan ini, merupakan pengembangan ide dari penelitian sebelumnya oleh Setyowati dan Suparwati (2012) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). Setyowati dan Suparwati (2012) mengamati sebanyak 4 (empat) variabel independen, 1 (satu) variabel dependen dan 1 variabel intervening, yaitu pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK dan PAD sebagai variabel independen, Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen dan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel intervening. Sedangkan penelitian ini mengamati sebanyak 5 (lima) variabel independen, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan Provinsi BKP, 1 (satu) variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan 1 (satu) variabel moderating yaitu realisasi belanja pelayanan dasar. Rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah DAU, DAK, PAD, DBH, BKP berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial maupun simultan ?
2. Apakah Belanja Pelayanan Dasar memoderasi hubungan DAU, DAK, PAD, DBH, BKP terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh DAU, DAK, PAD, DBH, BKP terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial maupun simultan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Masukan bagi perencanaan pembangunan di kabupaten/ kota agar dapat

mengoptimalkan alokasi DAU, DAK, PAD, DBH dan BKP untuk sumber pendanaan kegiatan.

2. Informasi dan masukan bagi peneliti sejenis, untuk melanjutkan pengembangan penelitian.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan dasar untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: Setyowati dan Suparwati (2012) yang melakukan studi mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai variabel intervening (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PE) terbukti tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), Dana Alokasi Umum (DAU) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), Dana Alokasi Khusus (DAK) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM) yang diprosikan dengan Belanja Modal (BM) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2011) melakukan studi dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal, Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan TKF tidak berpengaruh terhadap IPM kabupaten/kota di Sumatera Utara. PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Lugastoro dan Ananda (2013) melakukan studi mengenai Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hasil penelitian menemukan bahwa rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM

sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif signifikan. Sementara itu rasio DBH terhadap belanja modal menjadi satu- satunya variabel yang tidak signifikan mempengaruhi IPM. Pertumbuhan ekonomi menjadi variabel dengan pengaruh paling dominan terhadap IPM. Rosiana (2010) melakukan studi dengan judul Analisis Pengaruh Determinan Indeks Pembangunan Manusia Dikaitkan dengan Pembangunan Wilayah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil penelitian menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan dengan PDRB harga berlaku berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kota di Sumatera Utara, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian Riva Ubar Harahap (2010) dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

#### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Sidik (2013) mendefinisikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu komponen dana perimbangan pada APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

#### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah otonom melalui mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antarbidang (Subekan, 2012:88). Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Mardiasmo (2002), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah menjadi pendapatan asli daerah. Menurut Simanjuntak et al. (2013), *“Regional Origina Income is a representation of the revenue generated by the regional”*. Menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah representasi dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran daerah dan tidak menghambat kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Menurut Olubukunola (2011), *“Internally Generated Revenue (IGR) is the revenue that the local government generates within the area of its jurisdiction”*. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan pemerintah daerah yang dihasilkan dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan asli daerah yang tinggi menandakan otonomi daerah yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Idris (2016) lebih lanjut menjelaskan bahwa, *“Local Revenue (PAD) is all cash receipts into the right area recognized as an addition to net worth in one fiscal year and does not need to be paid back by the government”*. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan kas daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pajak yang dipungut pemerintah daerah jangan sampai menciptakan biaya pemungutan yang lebih tinggi dari pada pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya, makin banyak kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, ini menandakan makin kecilnya keterikatan regional terhadap sentral sebagai efek implementasi otonomi daerah atas asas secara nyata serta bertanggung jawab (Rinaldi, 2014). Peningkatan kemandirian daerah sangat erat hubungannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerahnya (Mahmudi, 2009). *“Revenue generated by local government is used to finance various expenditure programmes. Expenditure is an actual payment or creation of obligation to make a future payment for some benefits items or service received”* (Abba et al. 2015), menyatakan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai berbagai rencana pengeluaran. Pengeluaran adalah

pembayaran yang dilakukan saat ini untuk kewajiban pada masa yang akan datang dalam rangka memperoleh beberapa barang atau jasa yang diterima. Semakin besar pendapatan asli daerah akan membuat belanja daerah juga meningkat dan akan lebih banyak pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat (Adriani & Yasa, 2015). Sejalan dengan hal tersebut menurut Sasana (2011) menyatakan bahwa, “Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan yang positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah”.

### **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil dibagi menjadi dua yaitu dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam (DBHSDA). Dana Bagi Hasil merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pembagian penerimaan pusat dan provinsi yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota.

### **Dana Perimbangan**

Nasution(2015) menjelaskan bahwa, “*Regional bottom aid is a source of revenue comes from the budget to support the implementation of local authorities in achieving the objective of granting regional autonomy which is primarily done by an increase better in services and public welfare*”. Dana transfer/bantuan pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama dilakukan dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Sari, *et al.* (2014) menjelaskan bahwa “Dana perimbangan adalah modal yang berasal dari perolehan APBN yang diperuntukkan bagi daerah dalam upaya membiayai kepentingan daerah sebagai bentuk pengimplementasian asas desentralisasi”. Sejalan dengan hal tersebut menurut Capkova & Roncakova (2014) menjelaskan bahwa, “*The main mechanism for intergovernmental transfers is grants from central to local governments. A variety of unconditional (general) grant systems are in use to address vertical imbalances. Provision of conditional (specific) block grants from the centre to subnational governments aims to financing certain services, such as primary education,*

*social services and roads. Equalisation grants are used to address horizontal imbalances between local authorities”*

Berdasarkan pendapat Capkova & Roncakova (2014) mekanisme utama untuk transfer antar pemerintah adalah transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berbagai macam sistem transfer tanpa syarat (umum) digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal. Transfer dengan syarat (khusus) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk membiayai layanan tertentu, seperti pendidikan dasar, pelayanan sosial dan jalan. Transfer dana perimbangan digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan horizontal antar pemerintah daerah. Sumber-sumber dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Aprizay dkk, 2014). Kemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan kebalikan dari besarnya rasio penerimaan transfer di dalam pemenuhan pembelanjaan pemerintah. Belanja daerah sangat dipengaruhi oleh transfer dari pemerintah pusat (Abdullah & Halim, 2013). Perimbangan keuangan dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah (Sasana, 2011)

### **Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

### **Belanja Pelayanan Dasar (BPD)**

Menurut penjelasan teknis Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006, pemerintah daerah akan meningkat kinerjanya dengan mengarahkan pada pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan IPM dengan menekankan pada aspek pengeluaran yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Pengeluaran belanja dalam pelaksanaan APBD yang terkait dengan IPM menurut SE Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/1050/OTDA/2011 sebagaimana telah direvisi dengan SE Menteri Dalam Negeri

Nomor. 120.04/7303/ OTDA/2012 perihal pedoman penyusunan LPPD, yaitu pengeluaran untuk pelayanan dasar.

### **Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Menurut Ferreiro (2009), "*Government expenditure at first should be analyzed based on functional expenditure*". Menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada awalnya harus dianalisis berdasarkan pengeluaran fungsional. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan identifikasi kegiatan mana yang benar-benar masuk skala prioritas menurut ukuran kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Simanjuntak *et al.* (2013), "*Regional expenditure is all the expending of regional's cash in a one budget period*". Menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Pengeluaran kas daerah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri. Kainde (2013) mengemukakan bahwa, "Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan". Belanja pemerintah daerah sebaiknya lebih mengutamakan untuk kepentingan masyarakat daerah agar tujuan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat daerah dapat tercapai. Liesionis (2013), "*Unproductive expenditure hampers economic development and inhibits its growth*", menyatakan bahwa pengeluaran yang tidak produktif menghambat pembangunan ekonomi dan menghambat pertumbuhannya. Hal ini disebabkan pemerintah daerah lebih banyak membiayai pengeluaran untuk belanja pegawai dari pada pengeluaran untuk pembangunan daerah itu sendiri.

"*Government expenditure grew faster than the growth of its revenue. This resulted in persistent fiscal deficits consequently government had to borrow from both internal and external sources*"(Abba *et al.* 2015). Menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan. Hal ini mengakibatkan defisit fiskal terus-menerus akibatnya pemerintah harus meminjam dana dari sumber internal dan eksternal.

### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: (1) lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; (2) tingkat pendidikan, yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga); dan (3) tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah) (Mirza, 2012:4). IPM merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut, dengan rumus:  $IPM = (X1 + X2 + X3) / 3$  Dimana : X1= angka harapan hidup X2= tingkat pendidikan X3= tingkat kehidupan layak.

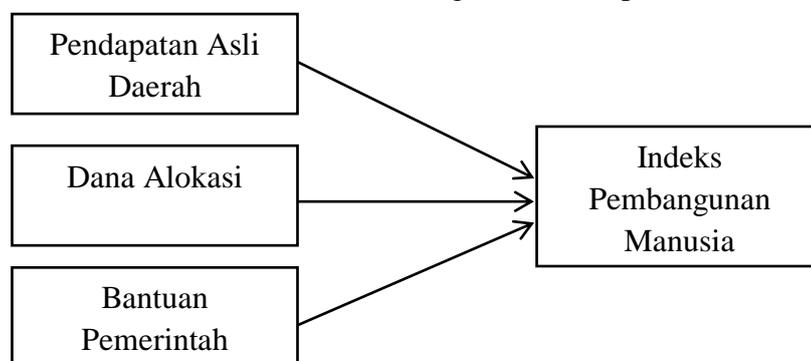
### Kerangka Pemikiran

(Gideon, *et al.* 2013) lebih lanjut menjelaskan bahwa, “*Revenues from taxes, user fees and Inter governmental transfers are likely to be insufficient to meet the infrastructural needs of local authorities. For this reason, local authorities may also want to access private capital and this is achieved through such initiatives as borrowing*”.

Pendapatan dari pajak, retribusi dan transfer dana antar pemerintah mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dari pemerintah setempat. Untuk alasan ini, pemerintah daerah juga mungkin ingin mengakses modal swasta dan ini dicapai melalui inisiatif seperti pinjaman. Dalam hal ini diharapkan pemerintah daerah lebih mengutamakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dari pada pengeluaran yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, karena kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari pembangunan daerah itu sendiri.

Gambar 1

Kerangka Pikir Empiris



### Hipotesis

Berdasarkan skema kerangka pemikiran, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
- H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana perimbangan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
- H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *survey*, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD. Teknik penarikan sampel yang digunakan oleh penulis adalah *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi APBD periode 2008-2018 yaitu sebanyak 10 periode.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dalam wilayah yurisdiksinya yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, dan harus didorong pertumbuhannya agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah yang setiap tahunnya terus meningkat. Berikut ini merupakan perkembangan PAD. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada pendapatan asli daerah, kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Proporsi pendapatan asli daerah yang rendah, menyebabkan pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah (Dewi, *et al.* 2014:81). Pendapatan Asli Daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20% (Setyowati & Suparwati, 2012).

Ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat merupakan wujud ketidakberdayaan pendapatan asli daerah (Mardiasmo; basri, 2013:168). Kemampuan

daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan perekonomian daerah dapat dikatakan masih sangat terbatas, mengingat peranan pendapatan asli daerah yang masih rendah dalam penerimaan APBD kota/kabupaten dan kesiapan sumber daya manusia di tingkat daerah masih sangat terbatas. Pendapatan Asli Daerah belum dapat mendorong peningkatan belanja daerah dan tidak sepenuhnya mampu menopang kemandirian daerah serta masih sangat bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, maka dari itu sumber- sumber pendapatan asli daerah perlu dioptimalkan. Peningkatan penerimaan pajak daerah disebabkan oleh meningkatnya penerimaan yang berasal dari pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan yang diikuti peningkatan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal ini dikarenakan semakin penduduk yang membutuhkan tempat tinggal sehingga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan juga meningkat. Jenis penerimaan yang mempunyai kontribusi terbesar kedua terhadap pendapatan asli daerah adalah jenis penerimaan yang berasal dari retribusi daerah yang cenderung naik turun setiap tahunnya selama tahun anggaran 2008-2018.

Peningkatan penerimaan retribusi daerah disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari jenis-jenis retribusi daerah yaitu dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Sebaliknya penurunan penerimaan retribusi daerah disebabkan menurunnya penerimaan dari jenis-jenis retribusi daerah. Jenis penerimaan yang mempunyai kontribusi terbesar ketiga terhadap pendapatan asli daerah adalah jenis penerimaan yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disebabkan oleh meningkatnya penerimaan yang berasal dari jenis-jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah. Contohnya penerimaan jasa giro. Jenis penerimaan yang mempunyai kontribusi terendah terhadap pendapatan asli daerah adalah jenis penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang cenderung naik turun setiap tahunnya selama tahun anggaran 2008-2018.

### **Dana Perimbangan**

Dana transfer atau bantuan pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerah dalam mencapai

tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama dilakukan dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Berikut ini merupakan perkembangan dana perimbangan periode 2008-2018.

Peningkatan dana perimbangan disebabkan oleh meningkatnya jenis penerimaan dana perimbangan. Contohnya dana alokasi umum, begitu juga sebaliknya penurunan dana perimbangan disebabkan oleh menurunnya jenis dana penerimaan yang diterima oleh contohnya dana alokasi khusus. Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak atau bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan dari pemerintah pusat digunakan untuk mengurangi kesenjangan fiskal baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah itu sendiri.

Masalah yang sering terjadi pada dana perimbangan yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah secara signifikan karena habis untuk belanja pegawai. Besarnya nilai transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan seharusnya menjadi insentif bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan fungsinya, pendapatan asli daerah seharusnya merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

### **Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada belanja daerah, masalah yang sering terjadi pada belanja dan anggaran belanja daerah adalah belanja pegawai yang ada dalam belanja tidak langsung, hingga mencapai lebih dari 50% dari total anggaran belanja tidak langsung memberikan beberapa dampak salah satunya yaitu pemborosan dibagian pegawai. Alokasi dana yang seharusnya dimaksimalkan untuk pelayanan dasar masyarakat banyak dipakai untuk membiayai belanja pegawai, akibatnya mengurangi alokasi anggaran untuk pelayanan publik atau masyarakat. Pada umumnya belanja daerah memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja daerah biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap perubahan kurs rupiah, inflasi, penyesuaian faktor makro ekonomi, dan perubahan jumlah cakupan layanan. Namun demikian dengan pradigma baru otonomi daerah, pemerintah

daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah dengan melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Belanja yang dikeluarkan oleh diharapkan lebih banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat daerah. Misalnya digunakan untuk pembangunan daerah.

Hasil analisis korelasi antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah adalah sebesar 0,966 dengan arah positif, hal ini membuktikan bahwa ketika pendapatan asli daerah mengalami peningkatan maka belanja daerah juga akan mengalami peningkatan dengan asumsi dana perimbangan dalam kondisi konstan. Hasil tersebut ditunjukkan dengan tabel dibawah ini. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh sebesar 0,694 dengan arah positif terhadap belanja daerah artinya pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang berbanding lurus dengan belanja daerah ketika dana perimbangan dalam kondisi tetap atau tidak mengalami perubahan, sehingga ketika pendapatan asli daerah mengalami peningkatan, maka belanja daerah juga akan mengalami peningkatan ketika dana perimbangan tidak mengalami perubahan. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah ketika dana perimbangan tidak mengalami perubahan adalah sebesar  $0,694 \times 100\% = 64,9\%$ . Pada hasil perbandingan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  diperoleh sebesar  $6,354 > 2,228$ , dengan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah

Penelitian sebelumnya memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini bahwa berdasarkan hasil uji t atau parsial variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, yakni (Rahmawati, *et al.* 2015) yang melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan hasil penelitian menggunakan uji-t yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut membuktikan bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah yang bersifat bantuan atau dapat dikatakan dana yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan fiskal terhadap pendanaan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, hal ini dapat menyebabkan rendahnya kewenangan dalam mengalokasikan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan untuk digunakan dalam mendanai kebutuhan daerah yaitu belanja daerah. Jauh lebih baik menggunakan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah sehingga dapat memberikan

kewenangan serta keleluasan yang luas bagi pemerintah daerah untuk mendanai belanja daerah sebagai kebutuhan daerah serta mewujudkan kemandirian daerah dalam kemampuan fiskal. Penelitian sebelumnya memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini bahwa berdasarkan hasil uji-t atau parsial variabel dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, yakni (Sari, *et al.* 2014) yang melakukan penelitian pada Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan hasil penelitian menggunakan uji-t yaitu dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara Simultan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia**

Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang berbanding lurus terhadap alokasi belanja daerah yaitu sebesar 0,973. Nilai *R Square* adalah sebesar 0,973 hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap belanja daerah sedangkan sisanya 3,7% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. Berdasarkan hasil perbandingan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  adalah  $162,298 > 4,256$ , yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sehingga hal ini membuktikan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja dengan tingkat signifikansi 0,000<sup>b</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diperoleh daerah maka akan semakin tinggi pula belanja daerah

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dilihat pada hasil pengujian koefisien korelasi yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai hubungan dengan arah positif dan signifikan terhadap belanja daerah Dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja. Berdasarkan hasil koefisien korelasi dana perimbangan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena pendapatan daerah yang diperoleh baik yang berasal dari pendapatan

asli daerah maupun dana perimbangan ditujukan untuk mendanai seluruh pengeluaran daerah khususnya kebutuhan dalam meningkatkan pembangunan daerah yang dapat mensejahterakan masyarakat daerah.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh dana perimbangan signifikan terhadap belanja daerah membuktikan bahwa masih bergantung pada pemerintah pusat, saran dari saya tingkatkan pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka pemerintah daerah diharapkan terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sebaiknya perencanaanya lebih ditingkatkan agar jumlah belanja daerah tidak melebihi pendapatan yang diterima Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan dana yang diperoleh dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan untuk membangun infrastruktur publik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian berikutnya dengan menambah daerah sampel penelitian dan rentang waktu penelitian sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisir. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian berikutnya dengan menambah variabel lain seperti pendapatan asli daerah yang sah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abba, Mohammed. Ahmed Bawa Bello & Salihu Aliyu Modibbo. (2015). *Expenditure And Internally Generated Revenue Relationship : An Analysis Government State, Nigeria. Journal Of Arts, Science & Commere.* Vol.3 No.1 PP 67-77
- Abdullah, S., & A. Halim, (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI, 1140-1159.
- Adriani & Yasa. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Tingkat Pengangguran melalui Belanja Tidak Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal EP Unud. Vol. 4 No. 11 : 1328-1356
- Aprizay, Yudi Satrya., Darwanis., Muhammad Arfan. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.* Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol.3, No.1 : 140-149
- Basri, Syafril. (2013). *Pengaruh Output Daerah Penerimaan Transfer dan Desentralisasi Fiskal terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Pekanbaru.* Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan. Vol.3, No.8 : 165-178.
- Capkova, S., Ing, D., & Roncakova, L. (2014). Fiscal Equalization and Regional Growth, I (February), 376-385.
- Christopher, Russell Olukayade et al. (2018).

- Determinants of Equity Price in the Stock Markets. International Research Journal of Finance and Economics ISSN 1450-2887 Issue 30 (2018). Euro journal Publishing, Inc.
- Dewi, Siska Puspita & Suyanto. (2014). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah*. Potensio. Vol. 20 No. 2 : 78-100.
- Hali, Muhammad Syafrudin. (2016). *Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari*. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Vol.1 No.1 : 65-81.
- Halim, Abdul. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta :Penerbit Salemba Empat.
- Idris, Irlan Fery. (2016). *Potential Increase In Revenue Collection BPHTB Tax District Musi Banyuasin*. European Journal Of Accounting, Auditing And Finance Research. Vol.4 No.1 PP 28-42.
- Jaya, Jeckly Dharma dan Eka Ardhani Sisdyani. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah melalui Situs Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 9, No.2 : 285-303.
- Kainde, Christian. (2013). *Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal EMBA. Vol. 1, No. 3 : 393-400.
- Mahmudi. (2009). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mamuka, Veronika & Inggriani Elim. (2015). *Analisis Dana Transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal EMBA. Vol.2, No.1 : 646-655.
- Mangowal, Jessy Christine. (2015). *Pendapatan Daerah Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara*. Manado: Jurnal EMBA. Vol. 1, No. 4: 1386-1396.
- Mardiasmo, (2016), *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2014). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Nasution, Abdillah Arif. (2015). *The Effect Of Fiscal Potential And Needs On Regional Bottom Aid Model (BDB) In Nort Sumatera Province*. European Journal Of Accounting Auditing And Finance Research. Vol.3 No.2 PP 70-86.
- Olubukunola, Olusola. (2011). *Boosting Internally Generated Revenue Of Local Governments In Ogun State, Nigeria*. Vol.8 No.1 336-348.
- Panji, I Putu Barat & I Gusti Bagus Indrajaya. (2016). *Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali*. E-Jurnal EP Unud. Vol.5 No.3 : 316-337.
- Rahmawati, Luluk Atika & Bambang Suryono. (2015). *Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.4, No.9: 1-20.
- Rinaldi, Udin. (2012). *Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal EKSOS, 8(2), h:105-113.
- Sa'diyah, Halimatus & Yetty Tri Putri. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara*. Jurnal Akuntansi. Vol.4 No.1. pp, 44-53.
- Samad, R. Putra & Rita Yani Iyan. (2013). *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan*

- Dana Perimbangan Kabupaten Rokan Hilir. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan.* Vol.3 No.8: 103-122.
- Santoso, Imam & I Wayan Suparta. (2015). *Flypaper Effect pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung.* Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.4 No.2 : 135-165.
- Simanjuntak, Lestari LF., Ahmad Subeki., Ika Sasti Ferina & Hasni Yusrianty. (2013). *Analysis Of Flypaper Effect In General Allocation Fund And Regional Income To Regional Expenditure Of Districts And Cities In South Sumatera. Four A Annual Conference.*
- Santoso & Rahayu. (2015). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri.* Dinamika Pembangunan, 2(1).
- Sari, Rosi Puspita & I Gusti Bagus Indrajaya. (2014). *Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung*